LAPORAN KEUANGAN



BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

- 5 Januari 2026 -

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat karunia-Nya sehingga dapat kami selesaikan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2025. Laporan Keuangan ini memuat segala transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam jangka waktu satu tahun, yang terdiri dari Realisasi Anggaran, Naraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk menyajikan informasi yang Transparansi dan Akuntabel berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada entitas tersebut. Laporan Keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Akhir kata, kami saderi bahwa laporan keuangan ini belumlah sempurna, sehingga kami mohon saran dan masukan, demi kemajuan dan perkembangan OPD kami.

Sangetta, Januari 2026

Pengguna Anggaran

Juliansyah, S.Hut
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197307092001121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... I

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABEL..... iii

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1

NARACA.....2

LAPORAN OPERASIONAL 3

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 4

BAB I PENDAHULUAN 6

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 5

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD..... 7

1.3 Sistematik Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan..... 9

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN..... 11

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 9

2.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Ditetapkan 11

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD..... 12

3.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran**Error! Bookmark not defined.**

3.1.2. Belanja..... 12

3.2 Penjelasan Pos - Pos Neraca..... 15

3.2.1 Aset Lanca..... 15

3.2.2 Aset Tetap..... 16

3.2.3 Aset Lainnya 18

3. 2.4 Ekuitas 20

3.3 Penjelasan Atas Pos - Pos Laporan Operasional ... 20

3.3.1 Pendapatan LQ 20

3.3.2 Beban LQ 20

3.4 Pejelasan Atas Pos- Pos Laporan Perubahan Ekuitas 24

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD **26**

4.1 Pejelasan Umum Organisasi 24

4.3 Penjelasan Atas Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas **24**

4.3 Pengungkapan Lainnya 24

6.4 Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah **24**

BAB V PENUTUPAN **30**

5.1 Kesimpulan 30

5.2 Saran 30

DAFTAR TABEL

Tabel	3.1	Realisasi Belanja Badan Riset dan Inovasi Daerah TA.2026dan TA 2024	12
Tabel	3.2	Realisasi Belanja Pengawai Badan Riset dan Inovasi Daerah TA 2025 dan TA 2024	13
Tabel	3.3	Ralisasi Belanja Barang dan Jasa Badan Riset dan Inovasi DaerahTA 2025 dan TA 2024	14
Tabel	3.4	Realisasi Belanja Modal Badan Riset dan Inovasi Daerah TA 2025 dan TA 2024	15
Tabel	3.5	Aset Lancar Badan Riset dan Inovasi Daerah TA 2025 dan TA 2024	15
Tabel	3.6	Rekapitulasi Persediaan Badan Riset dan Inovasi Daerah TA 2025 dan TA 2024	16
Tabel	3.7	Aset Tetap Badan Riset dan Inovasi Daerah TA 2025 dan TA 2024	16
Tabel	3.8	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Badan Riset dan Inovasi Daerah TA 2025 dan TA 2024	18
Tabel	3.9	Aset Lainnya Badan Riset dan Inovasi Daerah TA 2025 dan TA 2024	19
Tabel	3.10	Beban LO Badan Riset dan Inovasi Daerah Per 31 Desember 2025	20
Tabel	3.11	Beban Pengawai Badan Riset dan Inovasi Daerah Per 31 Desember 2025	21
Tabel	3.12	Beban Barang dan Jasa Badan Riset dan Inovasi Daerah Per 31 Drsember 2025	22
Tabel	3.13	Beban Penyusutan dan Amortisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Per 31 Desember 2025	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan keuangan menupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kutai Timur disusun untuk menyediakan infoprmasi mengenai laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengaevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksnaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada sutau periode pelaporan untuk kepentingan: a) Akuntabilitas memperlanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic; b) Manajemen membantu para pengguna anggaran untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sustu entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaaqn dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana; c). Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertenggungjawaban Badan Riset dan Inovasi

Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

Salah satu maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur yaitu dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta menjunjung prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Adapun catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami secara luas, tidak terbatas hanya untuk membaca tertentu ataupun manajemen entitas laporan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus membuat catatan atas laporan keuangan sehingga memudahkan dalam memahami isi dari laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis, setiap pos dalam laporan Realisasi Anggaran, Naraca, Lporaran Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pelaporan keuangan SKPD diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemrintah Daerah;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalian Barang, Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Stander Akuntansi Pemerintah (SAP);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomo 28 Tahun 2020;
10) Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11) Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daeran;
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2018 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
17) Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18) Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 96 Tahun 2022;
19) Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah;
20) Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Sistematik Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinrja Keuangan

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

3.2 Penjelasan atas Pos-Pos Naraca

3.3 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

3.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

BAB V PENUTUP

BAB II

IHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ada Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan pada Badan Riset dan Inovasi dan Inovasi Daerah periode 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Capaian Target Kinerja Keuangan (Belanja) SKPD

No.	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.672.062.599	9.957.591.952	85,31
1.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	173.496.881	170.595.192	98,33
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	162.896.881	159.997.192	98,25
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	0	0	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	0	0	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtsar Realisasi Kinerja SKPD	10.658.000	10.598.000	99,44
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0,00
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.210.787.231**	**7.724.292.802**	**83,52**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.108.814.831	7.591.332 811	83,34
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	101.972.400	101.972 400	100
	Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	0	0	0,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.210 000	47.580.000	47,48
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.210,000	47.580,000	47,48
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	838.178.444	739.475.004	88,22

No.	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.325.500	103.323.500	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.590.744	100.288.462	99,68
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	519.537.000	423.737.542	81,58
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.735.200	4.722.000	99,72
	Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	109.990.000	107.405.500	97,65
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	981.330.275	957.260.400	97,55
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	814.570.000	790.932.000	97,10
	Pengadaan Mebel	0	0	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin	166.760.275	166.328.400	99,74
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	176.087.768	172.902.739	98,19
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12.450.000	9.418.490	75,65
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.637.768	163.484.248	99,91
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	191.972.000	176.491.307	91,94
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	191.972.000	176.491.307	91,94
II	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.597..410.000	3.426.112.942	95,24
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	547.895.000	472.439.789	86,23
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	547.895.000	472.439.789	86,23
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	609.098.000	472.439.566	98,67
	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	609.098.000	472.439.566	98,67
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.886.487.000	1.869.185.320	99,08

No.	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	759.047.000	743.756.627	97,98
	Penelitian dan Perkembangan Perhubungan	1.127.413.000	1.125.408.693	99,82
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	553.932.000	483.523.247	87,29
	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaandi Bidang Teknologi dan Inovasi	293.952.000	251.473.931	85,55
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	259.980.000	232.049.316	89,26
	Total	15.289.472.599	13.383.704.894	87,65

Sumber: LRA Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025 (diolah)

2.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan Kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagai berikut:

1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengalokasikan anggaran penyediaan gaji dan tunjangan ASN sesuai kebutuhan.
2. Keterbatasan kompetensi aparatur Badan Riset dan Inovasi Daerah.
3. keterbatasan waktu pelaksanaan kajian dan koordinasi pihak stakeholder Belum optimalnya upaya peningkatan kulitas dan inovasi pelayanan sektor publik.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

3.1.1 Belanja

Belanja pada Badan Riset dan Inovasi Daerah terdiri dari belanja operasional yaitu belanja pegawai dan belanja barang jasa, kemudian belanja modal 3 yang terdidri dari belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal aset lainnya. Laporan realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

Realisasi Belanja Badan Riset dan Inovasi Daerah TA 2025 dan TA 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	% 2025	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Operasional	12.515.369.413,00	13.383.704.894,00	85,13	15.334.457.871,00
	Belanja Pegawai	9.108.814.831,00	7.591.332.911,00	83,34	7.352.690.533,00
	Belanja Barang dan Jasa	3.062.573..183,00	3.062.573.183,00	89,90	7.981.767.338,00
2	Belanja Modal	2.754.103.186,00	2.729.798.800,00	99,12	1.771.687.550,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	199.103.186,00	192.308.400,00	96,59	983.687.550,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	2.555.000.000,00	2.537.490.400,00	99,31	1.771.687.550,00
	Jumlah	15.269.472.599,00	13.383.704.894,00	87,65	17.106.145.421,00

Sumber: LRA Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025 (diolah)

Realisasi belanja tahun anggaran 2025 sebesar Rp 13.383.704.894,00 atau 87,65% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 15.269.472.599,00. Hal ini berarti, terjadi penurunan belanja sebesar Rp 3.722.440.527,00 atau 21,75% jika di banding dengan belanja tahun 2024 yang sebesar Rp 17.106.145.421,00.

3.1.1.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai Badan Riset dan Inovasi Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini secara rinci sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Belanja Pegawai

Badan Riset dan Inovasi Daerah TA 2025 dan TA 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.472.345.102,00	2.866.035.660,00	82,52	2.796.868.711,00
	Belanja Gaji Pokok ASN/PPPK	2.444.576.139,00	2.068.071.414,00	84,60	1.985.984.600,00
	Belanja Tunjangan Keluarga	150.000.000,00	128.130.822,00	85,42	185.606.178,00
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN/PPPK	129.508.750,00	78.670.000,00	60,74	155.730.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN/PPPK	467.958.793,00	383.570.000,00	81,97	341.610.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	17.517.000,00	16.280.000,00	92,94	16.300.000,00
	Belanja Tunjangan Beras	145.104.934,00	115.371.095,00	79,51	106.240.140,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.869.833,00	6.493.064,00	46,81	5.386.992,00
	Belanja Pembulatan Gaji	70.830,00	33.021,00	46,62	30.801,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	5.635.469.729,00	4.725.296.351,00	83,85	3.983.721.822,00
	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	5.635.469.729,00	4.725.296.351,00	83,85	3.983.721.822,00
3	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif	0,00	0,00	0,00	572.100.000,00
	Jumlah	9.108.814.831,00	7.591.332.911,00	83,34	7.352.690.533,00

Sumber: LRA Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025 (diolah)

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2025 sebesar Rp 7.591.332.911,00 atau 83,34% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 9.108.814.831,00. Hal ini terjadi kenaikan belanja pegawai sebesar Rp 238.642.370,00 atau 30,89% jika di banding dengan belanja tahun 2024 yang sebesar 7.352.690.533,00.

3.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa Badan Riset dan Inovasi Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3 Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Badan Riset dan Inovasi Daerah TA 2025 dan TA 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	405.463,314,00	398.979.589,00	98,40	1.11 435 134,00
2	Belanja Aset yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3	Belanja Jasa Kantor	614.597.268,00	595.966.108,00	96,97	914.406.217,00
4	Belanja sewa tanah	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	0,00
5	Belanja sewa peralatan mesin	751.200,000,00	733.932.000,00	97,90	913.600.000,00
6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	66.666.600,00
7	Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	35.000.000,00	32.500 000,00	92,86	1.018.160.000,00
8	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	127.950.000,00	121.636.332,00	95,07	61.550.000,00
9	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	44.953.095,00

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
10	Belanja Pemeliharaan Aset tidak berwujud	100.000.000,00	97.500.000,00	97,50	199.800.000,00
11	Belanja Perjalanan Dinas dalam negeri	1.250.844.000,00	971.992.754,00	77,71	3.636.976.092,00
12	Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	108.000.000,00	96.566.400,00	89,41	12.000.000,00
13	Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	100.500.000,00	89.006.400,00	88,62	12.000.000,00
	Jumlah	3.507.054.582,00	5.815.173.176,00	89,36	14.750.959.647,00

Sumber: LRA Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025 (diolah)

Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2025 sebesar Rp 5.815.173.176,00 atau 89,41% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 6.506.145.850,00. Hal ini terjadi peneurunan belanja barang dan jasa sebesar Rp 8.935.786.471,00 atau 60,58 % jika di bandingkan dengan belanja tahun 2024 sebesar Rp 14.750.959.647,00.

3.1.2. Belanja Modal

Jumlah belanja modal dapat dilihat pada Badan Riset dan Inovasi Daerah secara rinci dapat diliat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4 Realisasi Belanja Modal Badan Riset dan Inovasi Daerah TA 2025 dan TA 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja modal peralatan dan mesin	199.103.186,00	192.308.400,00	96,59	983.687.550,00
	Belanja modal alat kantor	5.516.000,00	5.100.000,00	92,46	38.656.100,00

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	Belanja modal alat rumah tangga	53.225.411,00	53.216.700,00	99,98	274.781.000,00
	Belanja modal meja dan kursi kerja rapat pejabat	0,00	0,00	0,00	28018.400,00
	Belanja modal alat studio vidio dan film	19.614.000,00	19.614.700,00	100	39.639.000,00
	Belanja modal komputer	84.077.775,00	84.077.700,00	100	804.592.550,00
2	Belanja Aset lainnya tidak berwujud	2.555.000.000,00	2.537.490.400,00	99,31	788.000.000,00
	Jumlah belanja Modal	2.754.103.186,00	2.729.800.000,00	99,12	1.771.687.550,00

Sumber: LRA Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025 (diolah)

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2025 sebesar Rp 2.729.800.000,00 atau 99,12 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 2.754.103.800,00. Hal ini berarti, terjadi kenaikan belanja modal sebesar Rp 958.112.450,00 atau 54,12% dari belanja tahun 2024 yang sebesar Rp 1.771.687.550,00.

3.2 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

3.2.1 Aset Lancar

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas dijual atau dipakai dalam satu tahun periode akuntansi. Total aset lancar yang dimiliki oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah per 31 Desember 2025 terdiri dari:

a. Beban dibayar dimuka Badan Riset dan Inovasi Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp 837.650.000,00.
b. Saldo persediaan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.445.400,00.

Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.5 dan Tabel 3.6.

Tabel 3.5 Aset Lancar Badan Riset dan Inovasi Daerah
TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025	Saldo Per 31 Desember 2024
1	Beban Dibayar Dimuka	837.650.000,00	837.650.000,00
2	Persediaan	1.445.400,00	1.445.400,00
	Jumlah Aset Lancar	839.095.400,00	839.095.400,00

Sumber: Neraca Tahun Anggaran 2025 (data diolah)

Tabel 3.6 Rekapitulasi Persediaan Badan Riset dan Inovasi Daerah
TA 2025 dan TA 2024

No.	Uraian	Saldo Awal	Belanja Persediaan (Rp)	Pemakaian Persediaan (Rp)	Reklasifikasi Belanja di Luar Belanja Persediaan	Saldo Akhir Persediaan
1	Persediaan Barang Pakai Habis					
	Alat tulis kantor	0,00	34.210.002,00	27.664.004,00	0,00	0,00
	Kertas dan alat cover	0,00	43.162.000,00	43.162.000,00	0,00	0,00
	Benda pos	1.445.400,00	3.000.000,00	4.445.400,00	0,00	0,00
	Bahan Komputer		16.576.000,00	16.675.400,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.445.400,00	96.947.002,00	91.866.804,00	0,00	0,00
2	Persediaan Barang Tak Pakai Habis					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Persediaan Barang Bekas di Pakai					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.445.400,00	96.947.002,00	91.866.804,00	0,00	0,00

Sumber: Neraca Tahun Anggaran 2025 (data diolah)

3.2.2 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai massa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau setahun yang kepemilikannya digunakan dalam kegiatanpemerintah atau

dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Aset tetap yang dimiliki Badan Riset dan Inovasi Daerah dan per 31 Desember 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.7 Aset Tetap Badan Riset dan Inovasi Daerah
TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Selisih
Peralatan dan Mesin	3.115.251.126,00	2.959.373.626,00	155.877.724,00
Akumulasi Penyusutan	(1.885.735.350,34)	(1.521.299.973,78)	(364.435377,44)
Jumlah	1.229.515.909,66	1,438.073.652,22	2 085 577.425.06

Sumber: Neraca Tahun Anggaran 2025 (data diolah)

Penjelasan atas aset tetap terdiri dari tabel di atas sebagai berikut:

a. Peralatan dan mesin

Nilai aset untuk peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp 3.115.251.126,00 antara lai alat bantu, alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, alat komunikasi, unit alat laboratorium, komputer unit peralatan komputer, peralatan olahraga, yang tercantun dalam laporan penilaian aset Milik Baden Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur. Nilai yang tercantun pada laporan penilaian merupakan rekapitulasi nilai dari hasil inventarisasi dan penilaian yang sesuai dengan standar pemerintah yang dimiliki Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur. Bila dibandingkan nilai aset tahun 2024 Rp 1.438.073.652,22 terjadi peningkatan sebesar Rp 2.085.577.425,06 sesuai dengan realisasi anggaran untuk belanja modal peralatan dan mesin.

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	2.959.373.626,00
Mutasi Tambah	Rp	192.308.400,00
Mutasi Kurang	Rp	- 9.661.264.367,00

Saldo Akhir per 31 Desember 2025	Rp	3.115.251.126,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	3.115.251.126,00

Adapun mutasi tambah dapat dirincikan sebagai berikut:

Koreksi atas Saldo awal	Rp	
LRA Belanja Modal	Rp	192.308,400,00
LRA Belanja Barang dan Jasa yang menjadi Aset Tetap (Kesalahan Penganggaran)	Rp	
LRA Belanja Modal Reklasifikasi Sesama Aset Tetap	Rp	
Hasil Inventarisasi (Sensus)	Rp	
Hibah	Rp	
Utang Belanja Modal	Rp	
Mutasi Masuk Antar SKPD	Rp	
Koreksi BPK	Rp	
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	192,308,400,00

Adapun mutasi kurang dapat dapat dirincikan sebagai berikut:

Pembayaran Utang Belanja Modal	Rp	
LRA Belanja Modal – Utang Belanja Modal RP.		
LRA Belanja Modal Yang Tidak Menjadi Aset - Tetap (Kesalahan Penganggaran)	Rp	
LRA Belanja Modal Reklasifikasi Sesama - Aset Tetap	Rp	
LRA Belanja Modal Yang Tidak Menjadi – Aset Tetap di Bawa Nilai Kepitalisasi	Rp	
LRA Belanja Modal Yang Tidak Menjadi – Aset Tetap (Diserahkan Ke Masyarakat)	Rp	
Hasil Inventarisasi (Sensus)	Rp	9.661.264.367,00
Hibah	Rp	
Koreksi BPK	Rp	
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	9.661.264.367,00

b. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai Akumulasi Penyusutan sebesar Rp 1.521.299,973,78 dari jumlah aset yang diakui oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah. Akumilasi Penyusutan mengurangi nilai aset tetap dalam neraca. Jumlah Aset Tetap Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp 3.115.251.126,00 sebelum dikurangi nilai akumulasi penyusutan ,Setalah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.521.299.973,78 nilai aset tetap menjadi Rp 1.593.951.152,22.

Tabel 3.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Badan Riset dan Inovasi Daerah TA 2025 dan TA 2024

No	Akumulasi penyusutan Aset Tetap	Saldo Awal 2025 (Rp)	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo Akhir 2024 (Rp)
1	Peralatan dan mesin	3.115.251.126,00	0,00	1.593.591.152,22	1.521.659.974,00
Jumlah		3.115.251 126,00	0,00	1.593.591.152,00	1.521.659.974,00

Sumber: Neraca Tahun Anggaran 2025 (data diolah)

3.2.3 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Per 31 Desember 2025 sebesar RP. 1.098.845.466,67 bila di bandingkan dengan jumlah aset lainnya tahun 2024 sebesar Rp. 1.438.073.652,22 ada Pengurangan sebesar Rp 339.228 185,55.

Tabel 3.9

Aset Lainnya Badan Riset dan Inovasi Daerah TA 2025 dan TA 2024

No.	Aset Lainnya	Saldo Awal 2025 (Rp)	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo Akhir 2025 (Rp)
1	Aset tak Berwujud	926.800.000,00	3.400.290.400,00	0,00	3.400.290.400,00
2	Aset Lain-Lainnya	1.098.845.466,67			168.469.200,00
3	Akumulasi Amortisasi aset tak berwujud	(32.673.333,33)			(32.673.333,33)
	Jumlah				

Sumber: Neraca Tahun Anggaran 2025 (data diolah)

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	2.959.373.626,00
Mutasi Tambah	Rp	192.308.400,00
Mutasi Kurang	Rp	9.661.264.367,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	Rp	3.115.251.126,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	3.115.251.126,00

Adapun mutasi tambah dapat dirincikan sebagai berikut:

Koreksi atas Saldo awal	Rp	
LRA Belanja Modal	Rp	192.308.400,00
LRA Belanja Barang dan Jasa yang menjadi Aset Tetap (Kesalahan Penganggaran)	Rp	
LRA Belanja Modal Reklasifikasi Sesama Aset Tetap	Rp	
Hasil Inventarisasi (Sensus)	Rp	
Hibah	Rp	
Utang Belanja Modal	Rp	
Mutasi Masuk Antar SKPD	Rp	
Koreksi BPK	Rp	
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	192.308.400,00

Adapun mutasi kurang dapat dapat dirincikan sebagai berikut:

Pembayaran Utang Belanja Modal	Rp	
LRA Belanja Modal – Utang Belanja Modal RP.		
LRA Belanja Modal Yang Tidak Menjadi Aset - Tetap (Kesalahan Penganggaran)	Rp	
LRA Belanja Modal Reklasifikasi Sesama - Aset Tetap	Rp	
LRA Belanja Modal Yang Tidak Menjadi - Aset Tetap di Bawa Nilai Kapitalisasi	Rp	
LRA Belanja Modal Yang Tidak Menjadi - Aset Tetap (Diserahkan Ke Masyarakat)	Rp	
Hasil Inventarisasi (Sensus)	Rp	9.661.264.367,00
Hibah	Rp	
Koreksi BPK	Rp	
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	9.661.264.367,00

3.2.4 Ekuitas

Saldo Ekuitas Kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah Per 31 Desember 2025 adalah sebesar (5.969.152.818,00)

3.2 Penjelasan atas Pos-Pos Operasional

3.3.1 Pendapatan -LO

Pendapatan -LO adalah hak daerah yang di akui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Adapun pendapatan - LO Badan Riset dan Inovasi Daerah per Desember 2025 sebesar Rp. 10.818.785.094,00 atau mengalami Penurunan sebesar Rp. 4.569.560.109,00 atau 29,69,% dari tahun 2024 sebesar Rp. 15.388.345.203,00.

3.3.2 Beban -LO

Beban -LO adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi kjasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Adapun Beban – LO Badan Riset dan Inovasi Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp 10.818.785.094,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp 4.569.560.109,14 atau 29,69% dari tahun 2024 sebesar Rp 15.388.345.203,14 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.10
Beban – LO Badan/Dinas Per 31 Desember 2-025

No	Beban- LO	Saldo LO TA. 2025 (Rp)	Saldo LO TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Pegawai	7.591.332.911,00	7.352.690.533,00	238.642.378,00	3,25
2	Beban Barang dan Jasa	3.227.452.183,00	7.737.249.862,00	(4.509.797.643,00	(58,29)
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	298.404.844,14	(298.404.844,14)	(100,00)
Jumlah		10.818.785.094,00	15.388.345.203,14	(4.569.560.109,00)	(29,69)

Sumber: Laporan Operasional TA. 2025 (data diolah)

a. Beban Pegawai

Secara keseluruhan beban pegawai Dinas/Badan per 31 Desember 2025, sebesar Rp 7.591.332.911,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 238.642378,00 atau 3,25% dari tahun 2024 sebesar Rp 7.352.690.533,00 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11 Beban Pegawai Baden Riset dan Inovasi Daerah Per 31 Desember 2025

No.	Beban Pegawai LO	Saldo LO TA 2025	Saldo LO TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Gaji pokok ASN/Uang Representasi LO	2.068.071.414,00	1.965.964.600,00	238.642.378,00	3,25
2	Beban Tunjangan Keluarga LO	197.547.966,00	185.606.178,00	11.941.788,00	6,43
3	Beban Tunjangan Jabatan	78 670.000,00	155.730.000,00	(77.060.000,00)	(49,48)
4	Beban Tunjangan Fungsinal LO	383.570.000,00	341.610.000,00	41.960.000,00	12,28
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum LO	16.280.000,00	16 300.000,00	(20.000,00	0,12
6	Beban Tungan Beras LO	115.371.095,00	106.240.140,00	9.130.955,00	8,59
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus LO	6.493.064.,00	6.386.992,00	1.106.072,00	20,63
8	Beban Pembulatan Gaji LO	33.021.,00	30 801,00	2.220,00	7,21
9	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja LO	4.725.296.351,00	3.983.721.822,00	741.574.529,00	18,62
10	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	572.100.000,00	(572.100.000,00	(100,00)
Jumlah		7.591.332.911,00	7.352.690.533,00	236.642.378,00	3,25

Sumber: Laporan Operasional TA. 2025 (data diolah)

b. Beban Barang dan Jasa

Secara keseluruhan beban barang dan Jasa- LO Badan Riset dan Inovasi Daerah Per 31 Desember 2025 sebesar Rp 3.062.573.183,00 mengalami penurunan sebesar Rp 2.263.805.845,00 atau 52,67% dari tahun 2024 sebesar Rp 7.961.767.338,00.

Terdapat perbedaan antara saldo belanja barang dan jasa pada LRA dan Beban Barang dan Jasa pada LO karena ada adanya mutasi tambah dan kurang yaitu penambahan beban Bahan Pakai Habis sebesar Rp 405.463.314,00 dan pengurangan Beban sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp 733.932.000,00 yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Beban Barang dan Jasa Badan Riset dan Inovasi Daerah Per 31 Desember 2025

No.	Beban Barang dan Jasa LO	TA 2025 (Rp)				Saldo LO TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
		Saldo LO (Rp)	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo LO			
1	Beban Bahan Pakai Habis LO	386.979.569,00	0,00	0,00	0,00	1.117.567.622,00	(718.88.033,00	(64,30
2	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi LO	0,00	0.00	0.00	0,00	500.000,00	(500.000,00)	(100)
3	Beban Jasa Kantor LO	595.966.109,00				914.406.217.00	(318.440.109,00)	(34,85)
4	Beban Sewa Tanah	13.500.000,00				0,00	13.500.000,00	100
5	Beban Sewa Peralatan dan Mesin LO	898.811.000,00				662.650 000,00	236.161.000,00	35,64
6	Beban Sewa Gedung dan Bangunan LO	0,00				68.686.800.000,00	(68.686,800.000,00	(100)
7	Beban Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi Bimbingan	35.500.000 00				1.018.160.000,00	(985.660.000,00	(96,81)

No.	Beban Barang dan Jasa LO	TA 2025 (Rp)				Saldo LO TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
		Saldo LO (Rp)	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo LO			
	Teknis serta Pelatihan LO							
8	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin LO	121.636.332,00				61.550.000,00	60.086.332,00	97,62
9	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan LO	0,00				44.953.095,00	(44.953.095,00	(100)
10	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah LO	971.982.754,00				3.636.976.092,00	(2.664.993.338,00)	(73,27)
11	Beban yang di Berikan Kepada Pihak Ke Tiga/Pihak Lain/ Masyarakat LO	7.500.000,00				0,00	7.500.000,00	100
12	Beban Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat LO	96.566.400.000,00				12.000.000,00	84.566.400,00	704,72
Jumlah		3.227.452.163,00				7.737.249.626,00	(4.509.797.643,00)	58,29

Sumber: Laporan Operasional TA. 2025 (data diolah)

c. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi LO Per 31 Dsember 2025 sebesar **Rp 0,00** dengan selisih sebesar Rp 298.404844,14 dari tahun 2024, lebih rincinya dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 3.13 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Badan Riset dan Inovasi Daerah Per 31 Desember 2025

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	265.731.510,00	(265.731.510,00)
2	Beban Amortisasi Aset Lainnya Aset tidak Berwujud	0,00	32.673.333,00	(32.673.333,00)

Sumber: Laporan Operasional TA. 2025 (data diolah)

3.3 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan naraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal tahun anggaran 2025 sebesar Rp 3.376.014.51,89 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2024

b. Penambahan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

Penambahan/pengurangan ekuitas bersumber dari saldo Surplus/Defisit – LO sebesar minus Rp 13.383.704.894,00 merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada Naraca Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

c. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Saldo kewajiban untuk dikonsolidasikan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 13.383.704.894,00.

d. Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesehatan Mendasar

Perhitungan koreksi nilai persediaan tahun 2025 sebesar Rp 0,00 selisihaset tetap sebesar Rp 0,00. Koreksi lainnya sebesar Rp 0,00. Koreksi ekuitas. Akumulasi Penyusutan Aset tetap karena mutasi dan Inventarisasi sebesar Rp 0,00, Korek Ekuitas Dana Transfer sebesar Rp 0,00. Koreksi Ekuitas atas Klasifikasi Aset Tetap Tahun Sebelumnya sebesar Rp 0,00.

e. Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir Tahun 2025 bertambah sebesar Rp 5.804.273.818,89 merupakan saldo Ekuitas Awal Tahun 2026. Nilai pada ekuitas akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp 5.804.273.818,89 merupakan penjumlahan dari ekuitas awal ditambah surplus/defisit -LO ditambah dengan kewajiban untuk dikonsolidasi dan dampak kumulatif kebijakan keselahan mendasar.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

4.1 Penjelasan Umum Organisasi

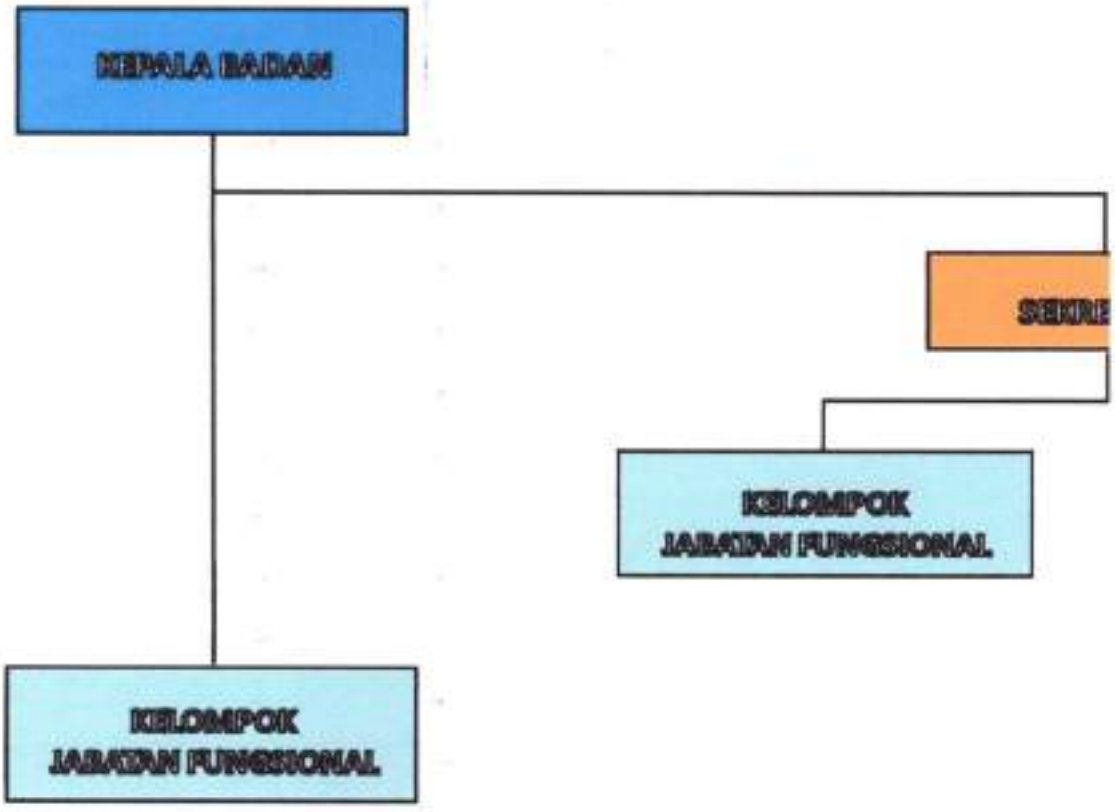
4.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Tugas Pokok

Sejak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 berdampak Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 terbentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur yang merupakan *supporting unit* penyelenggaraan pemerintahan daerah dan diterbitkannya Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 38 Tahun 2023 diganti dengan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2024.

Susunan organisasi dan tata kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Timur sesuai Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Susunan organisasi dan tata kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada Gambar 4.1. Susunan Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur.



Gambar 4.1
Susunan Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur

2. Tugas BRIDA membantu Bupati dalam:
   a. melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan;
   b. melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai

landasan dalam perencanaan Pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

3. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan Pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang bepedoman pada nilai Pancasila;
   b. penyusunan perencanaan program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah yang bepadoman pada nilai Pancasila;
   c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah;
   d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah;
   e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah;
   f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;

g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
h. pelaksanaan administrasi badan; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

4.2 Pengungkapan Lainnya

4.2.1 Domisili

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kutai Timur beroperasi di Gedung Serba Guna (GSG) lt. II Jl. Parkir Utara, Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta Utara.

4.2.2 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintahan;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tenteng Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2021 tenteng Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur;

7. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah;

BAB V

PENUTUPAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada Bab-Bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Neraca Badan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Kutai Timur Per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 ditutup dengan Jumlah Aset Lancar sebesar Rp 893.095.400,00 dan Aset Tetap sebesar Rp 1.953.951.152,22.
2. Realisasi belanja Per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 13.383.704.894,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 15.269.472.599,00.
3. Lebih kecilnya realisasi belanja dari anggaran dikarenakan sebagian besar akibat kelebihan dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN.
4. Saldo kas Per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1.885.787.705,00.
5. Secara umum, pencapaian kinerja OPD Badan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Kutai Timur Per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 telah dapat memenuhi tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan, Hal ini dapat tercermin dari realisasi anggaran yang mencapai Rp 13.383.704.894,00.

5.2 SARAN

Adapun saran atas Laporan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyusunan rincian belanja dilakukan pembahasan internal
2. Peningkatan kompetensi aparatur Badan Riset dan Inovasi Daerah
3. Dilakukan rapat pengendalian pelaksanaan secara rutin.
4. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan dan rekomendasi langkah perbaikan di atas.